

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam memahami suatu objek penelitian dibutuhkan pengetahuan dasar terkait aspek-aspek yang hendak diteliti, Bab ini secara khusus akan membahas mengenai gambaran umum mengenai Gerakan Golput. Gerakan golput di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dalam bab ini karena memiliki korelasi yang besar terhadap konten dan wacana yang terbentuk dalam gerakan SayaGolput di twitter dan medium yang akan dibahas secara spesifik.

2.1 Kemunculan *Abstain* di Dunia

Abstain dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak memberikan suara dalam pemungutan suara. *Abstain* di Indonesia disebut dengan Golongan Putih (Golput). Gerakan golput juga merupakan bagian dari partisipasi politik warga negara karna adanya keikutsertaan warga negara dalam memberikan kritik terhadap sistem politik suatu negara. Partisipasi masyarakat dalam proses politik adalah hal yang penting karna sesuai amanat UUD 1945 kedaulatan ada di tangan Rakyat maka rakyat berhak untuk menyampaikan keresahan, protes dan kritik terhadap pemangku kebijakan.

Partisipasi pemilih adalah salah satu indikator penting tentang bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka. Jumlah pemilih yang lebih tinggi dalam banyak kasus merupakan tanda vitalitas demokrasi, sementara jumlah pemilih yang lebih rendah biasanya dikaitkan dengan apatis pemilih dan ketidakpercayaan terhadap proses politik. Karena pentingnya, aktor

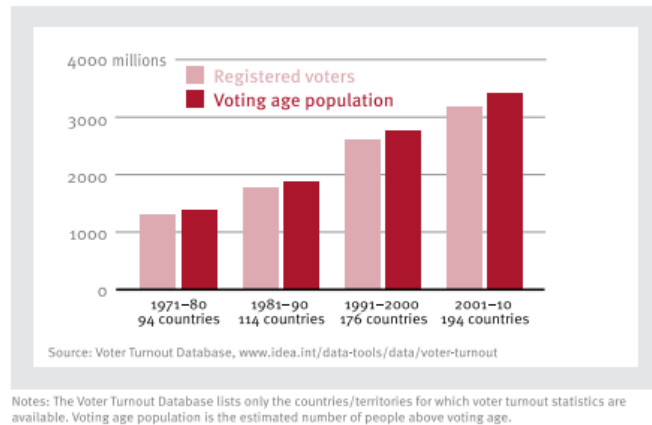
media dan masyarakat sipil, serta komunitas pendukung demokrasi dan banyak pemangku kepentingan lainnya khawatir ketika warga tidak hadir untuk memilih.

2.1.1. Sejarah Kemunculan *Abstain* di Dunia

Jumlah negara yang mengadakan pemilihan parlemen langsung telah meningkat signifikan sejak tahun 1990-an. Alasan utama untuk pertumbuhan ini adalah akhir dari Perang Dingin, yang mendorong proses demokrasi di daerah sebelumnya di bawah pengaruh Soviet dan munculnya pemilihan multipartai melintasi benua Afrika. Dengan demikian, populasi global orang berhak memilih meningkat lebih dari dua kali lipat dalam empat dekade hingga 2010. Pertumbuhan umum populasi global juga telah berkontribusi pada pertumbuhan populasi pemilih global. Hanya ada beberapa negara yang tersisa di dunia, seperti Brunei Darussalam, Cina, Eritrea, Arab Saudi dan Kota Vatikan, yang tidak mengadakan pemilihan nasional langsung (*Voter Turnout Trends around the World* oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* : 2016).

Grafik 2.1

Statistik populasi pemilih untuk negara yang menggunakan pemilihan langsung



Sumber: *International IDEA*

Terlepas dari pertumbuhan populasi pemilih global dan jumlah negara-negara yang mengadakan pemilihan, jumlah pemilih rata-rata global telah menurun signifikan sejak awal 1990-an. Jumlah pemilih global adalah cukup stabil antara tahun 1940-an dan 1980-an, hanya turun sedikit dari 78 persen hingga 76 persen selama seluruh periode. Itu kemudian jatuh tajam di 1990-an menjadi 70 persen, dan terus menurun hingga mencapai 66 persen di periode 2011–2015 (International IDEA : 2016).

Penurunan tingkat partisipasi pemilih secara global telah terjadi secara paralel dengan munculnya banyak suara negatif tentang keadaan demokrasi di dunia. Diamond (2015:152) berpendapat bahwa “Tingkat partisipasi pemilih yang rendah adalah tanda-tanda tambahan dari penyakit demokrasi”.

Berdasarkan hasil temuan International IDEA pada 2016 dengan judul *Voter Turnout Trends around the World*. Alasan utama tingkat partisipasi di Eropa rendah adalah berakhirnya Perang Dingin yang merangsang proses demokratisasi di

negara-negara bekas Uni Soviet. Demokratisasi di Afrika juga berkembang terutama sejak penerapan sistem multi-partai. Tren golput paling kentara di Eropa. Rata-rata pemilihnya turun dalam persentase yang paling signifikan dibandingkan di wilayah lain. Di Asia dan Amerika tren partisipasi pemilih tampak lebih stabil dari waktu-waktu. Namun tetap saja persentase di kedua wilayah tersebut jauh di bawah rata-rata pemilih global.

Afrika secara umum memiliki tingkat partisipasi pemilu terendah dalam tiap dekade sejak 1950-an. Namun perlu dicatat bahwa IDEA hanya memiliki data dari tiga negara pada 1950-an. Jumlahnya naik ke 10 negara pada 1960-an, 11 pada 1970-an, dan 16 pada 1980-an. Pada 1990-an, jumlahnya “meledak” menjadi 43 negara di Afrika yang menyelenggarakan pemilu legislatif nasional. Kondisi yang sama terjadi untuk wilayah Oseania karena baru Australia dan Selandia Baru yang mengadakan pemilu pada 1940-an dan 1950-an. Pemilu baru ada di Papua Nugini mulai pertengahan 1960-an, dan tingkat partisipasinya juga masih rendah.

2.2 Gerakan Golput di Indonesia

Dalam bahasa Indonesia, istilah *abstain* bisa berarti golput (golongan putih). Namun secara historis, istilah tersebut merujuk pada mereka yang tetap datang ke tempat pemungutan suara dan merusak suara sebagai suatu bentuk protes politik terhadap pemilu di masa rezim orde baru.

2.2.1. Golput 1971-2014

Kata “golput” semakin mereduksi gerakan politik yang bias namun dapat dikatakan signifikan dan sangat berani yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Gerakan golput ideologis yang pernah dilakukan pada tahun 1990-an dan dilakukan oleh Arief Budiman dan kawan-kawan, telah menjadi gerakan moral bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak dan keyakinannya untuk tidak memilih siapapun (Budiman:2006). Golput pada saat itu juga menjadi sebuah kritik terhadap rezim Orde Baru.

Gerakan golput atau Golput (golongan putih) pertama kali muncul pada Pilkada tahun 1971 dan dipimpin oleh Arief Budiman. Target gerakan golput saat itu adalah Golongan Karya Partai (Golkar). Awalan 'gol-' pada kata “golput” sengaja mengambil awalan “Golkar”. Bukan hanya nama, logo Golput juga meniru logo partai Golkar. Pada masa itu logo propaganda Golput juga menggunakan logo serupa logo segi lima. Namun, bagian tengahnya adalah kosong dan putih (Heryanto, 2019). Propaganda golput oleh Arief Budiman ini disebarluaskan di tempat-tempat umum dan dengan slogan “pilihlah warna putih.’ Dengan begitu, pemungutan suara tidak bias dihitung sebagai suara yang sah

Gambar 2.2.
Logo Golput 1971



Sumber : literasipublik.com

Gambar 2.3.
Golput pada 1971



Sumber : news.detik.com

Pada masa rezim Orde Baru, munculnya kelompok yang memutuskan untuk golput lebih bersifat gerakan protes terhadap sistem politik dan kebijakan politik dari rezim orde baru. Terdapat tiga kebijakan politik pemerintah orde baru yang dinilai oleh seluruh pendukung gerakan golput sebagai penghambat demokratisasi politik. Pertama, adanya kebijakan massa mengambang, merupakan pembatasan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten dan kota madya. Secara konsep, kebijakan massa mengambang sebenarnya cukup baik, yaitu dengan memberikan kebebasan untuk warga yang ingin berafiliasi dengan partai politiknya. Namun, pada prakteknya kebijakan massa mengambang ini di Indonesia justru tidak sesuai dengan yang diharapkan di banyak negara demokrasi. Karena, implementasi masa mengambang telah membatasi ruang gerak rakyat dalam berafiliasi dengan partai politik. Dampaknya, kreativitas dan juga dinamika politik masyarakat menjadi berhenti.

Perilaku *abstain* atau tidak memilih dalam pemilihan umum di masa Orba adalah refleksi dari ketidakpercayaan atau rendahnya kepercayaan politik. Maka dari itu, perilaku golput di masa Orba kebanyakan dilakukan sebagai bentuk protes

atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik di masa rezim itu. Di masa yang seperti itu, maka tidak mengherankan di masa Orde Baru banyak muncul perasaan alienasi dan juga apatisisme di mana banyak rakyat yang merasa *powerless* terhadap sistem politik yang ada pada masa itu. Struktur politik Orde baru yang dibangun oleh rezim Soeharto dengan mengukuhkan tiga pilar politiknya (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) sebagai penggerak utamanya, menjadikan rakyat merasa apa pun pilihannya dalam pemilihan umum tidak akan mengubah sistem yang ada.

Sedangkan gerakan golput yang terjadi pada pemilihan umum 2004 seakan menjadi kemunduran terhadap reformasi yang telah diperjuangkan pada tahun 1998 dan semangat pemilih pada pemilu 1999. Kenaikan angka golput yang sangat besar pada pemilihan umum 2004 disebabkan karna adanya rasa kekecewaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada, baik di parlemen maupun partai politik. Penilaian kinerja atas lembaga eksekutif (presiden) dan yudikatif (peradilan) yang dianggap buruk, juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi.

Golput di Pemilu 2019 menarik banyak perhatian, seperti yang terjadi ketika Arief Budiman meluncurkan Kelompok Putih di 1971. Dalam pemilu 2019, aksi kolektif golput disintesiskan dalam gerakan SayaGolput. Gerakan SayaGolput terdiri dari spektrum ideologis yang beragam. Dikutip dari informasi platform Medium resmi SayaGolput, SayaGolput adalah gerakan kewarganegaraan yang memutuskan untuk “memilih untuk tidak memilih”. Memilih untuk tidak hadir adalah upaya untuk kembali ke demokrasi yang lebih substansial. Gerakan SayaGolput dijelaskan dalam manifesto mereka yang disebut “Kertas Putih

Golongan Putih 2019” di mana mereka menyatakan bahwa rakyat tidak punya pilihan dalam pemilu 2019.

Realitas golput di kalangan prodemokrasi bisa dipahami sebagai gerakan protes. Gerakan golput pada pemilu 2019 tersusun intelektual dari aktivis perkotaan di berbagai sektor yang mengumpulkan diri mereka sendiri di gerakan yang tidak terorganisir secara formal tetapi memiliki prinsip-prinsip organisasi, ideologi, program aksi, dan agenda kelompok. Memiliki aspirasi yang sama seperti yang pertama kali diciptakan di 1971, yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi di semua aspek kehidupan masyarakat. Semangat itu juga membuat aktivis pro-demokrasi memilih tidak memberikan suara (*abstain*) pada Pemilu 2019. Ada garis yang jelas antara formal demokrasi liberal, di satu sisi, dan demokrasi partisipatif yang lebih substantif di sisi lain. Paling minim definisi konvensional cenderung membatasi sebagai sistem politik, yang berbeda dari sistem ekonomi dan sosial. Uhlin (1998) mendefinisikan demokratisasi meliputi kehidupan sosial dan ekonomi. Golput menjadi aksi kolektif di Pemilu 2019 saat rakyat dihadapkan dengan situasi kebijakan pemerintah yang semakin tidak memberikan transformasi terhadap kehidupan banyak orang.

Pada Pemilu 2014, gerakan *abstain* hadir untuk narasi suara alternatif oleh kaum kiri pro-demokrasi progresif. Gerakan *abstain* dulu disebarluaskan melalui saluran utama Komite Politik Alternatif. Slogan utama saat itu adalah “Lawan Pemilu 2014, Bangun Partai Alternatif!”. Jaringan dibangun oleh beberapa organisasi termasuk KP SBGN, KP SGMK, SMI, GSPB, PPR, PPI, KPO PRP, FPBI, SBMI, Pembebasan, LIPS, PPBI Jatim, Mahardhika Mojokerto, SBM,

Frontjak, Sebumi, GRI, dan SPRI (Arahjuang.com, 2014). Menurut mereka, capres pemilu 2014 pada hakikatnya sama. Tidak ada calon yang memberikan jawaban atas persoalan rakyat yang sebenarnya. Selain itu, janji dan program kesejahteraan dari elit politik pada pemilu sebelumnya juga gagal terwujud. Dengan demikian, dibutuhkan gerakan alternatif berskala nasional dengan sikap dan posisi yang tegas di Pemilu 2014. Gerakan tersebut diharapkan dapat mendorong perjuangan rakyat. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga memutuskan golput. Mereka menyatakan tidak akan berkompromi dengan berbagai produk dari negara kolonial Indonesia. Posisi KNPB tetap *abstain* atau tidak ikut Pemilu 2014. Mereka tidak berkompromi dengan program apa pun yang dilakukan oleh Republik Indonesia, khususnya pemilihan presiden (Suarapapua.com, 2014).